

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena dinamika diskursus publik tercermin pada interaksi antara berbagai pihak di ruang publik di mana pemikiran, nilai, dan pandangan masyarakat dibentuk dan diubah. Dinamika ini menunjukkan adanya perbedaan, perubahan perspektif, nilai dan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu (Salahuddin, 2024, p. 4). Dinamika sering menunjukkan adanya ketidakstabilan respons yang dipengaruhi oleh beragam kepentingan, sudut pandang dan latar belakang sosial budaya (Salahuddin, 2024, p. 43). Kondisi ini kerap memunculkan permasalahan seperti konflik, miskomunikasi, serta dominasi narasi tertentu, yang pada akhirnya menghambat tercapainya pemahaman bersama di tengah masyarakat (Salahuddin, 2024, p. 43). Selain itu, muncul permasalahan pada sebuah diskursus publik yaitu ketidaksetaraan dalam akses serta keterlibatan dalam proses komunikasi (Fuchs, 2021, p. 90). Disinformasi dan berita palsu juga menjadi masalah yang dapat memengaruhi cara pandang masyarakat (Aimeur., et al, 2023, p. 13). Survei yang dilakukan KIC menunjukkan, sebanyak 30% hingga 60% masyarakat Indonesia masih terpapar isu *hoax* saat mengakses informasi dan berkomunikasi melalui dunia maya (Cahyadi, 2021). Hanya 21% hingga 36% masyarakat yang dapat mengidentifikasi atau mengenali informasi yang tidak benar (Cahyadi, 2021). Masalah tersebut sering dipicu oleh penggambaran yang tidak sesuai dalam sebuah media (McCombs & Valenzuela, 2020, p. 98).

Penggambaran dalam media sering menghadapi banyak masalah yang memengaruhi persepsi publik dan dampaknya terhadap masyarakat (Wolf, 2013, p. 199). Salah satu yang sering muncul dalam masalah penggambaran di media adalah penguatan stereotip gender (Gallagher, 2013, p. 10). Media termasuk televisi, film, iklan dan berita sering menunjukkan

gambaran yang sempit terkait dengan gender (Gallagher, 2013, p. 10). Penelitian yang dilakukan oleh PLAN International dan *Geena Davis Institute on Gender in Media* (GDIGM) yang berjudul *Rewrite Her Story* (2019) menyatakan bahwa sebanyak 85,3% perempuan sering kali ditampilkan sebagai korban kekerasan seksual dalam sebuah film dan iklan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Karupiah., et al (2020, p. 541) juga menyatakan bahwa, film sering menggambarkan perempuan sebagai korban dan pria sebagai pelaku kekerasan, sehingga hal tersebut membentuk opini publik dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat. Selain itu, penggambaran pada sebuah media sering menampilkan konten yang tidak sesuai dengan kenyataan dan narasi yang dilebih-lebihkan (Wagner & Boczkowski, 2019, p. 876). Media memilih elemen-elemen sensasional yang menarik perhatian masyarakat, seperti penggambaran kekerasan seksual pada sebuah film secara eksplisit (Zannettou., et al, 2019, p. 34).

Namun, isu kekerasan seksual masih menjadi permasalahan penting di Indonesia (Komnas Perempuan, 2023). Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa, dari keseluruhan jumlah kekerasan yang dilaporkan, kasus kekerasan seksual masih menempati posisi pertama di Indonesia. Pada catatan tahunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan sebesar 49 kasus sejak tahun 2022, sehingga mencapai total 4.371 kasus yang dilaporkan pada tahun 2023 (Komnas Perempuan, 2023). Dari total kasus kekerasan yang dilaporkan, sebanyak 2.228 merupakan kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2023). Sehingga, penggambaran yang tidak sesuai dalam media termasuk film sering menimbulkan perdebatan karena membentuk opini publik dan ketidakpastian terkait isu-isu yang dibahas seperti kekerasan seksual (Eastel., et al, 2015, p. 107).

Dinamika diskursus publik terkait dengan penggambaran kekerasan seksual dalam film merupakan topik yang relevan dan kompleks, di era transformasi sosial dan teknologi yang

cepat. Topik tersebut menjadi relevan dan kompleks karena masyarakat semakin kritis serta memiliki perspektif yang beragam terkait isu kekerasan seksual (Andina, 2023). Media massa khususnya film memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menciptakan diskursus tentang berbagai masalah sosial termasuk kekerasan seksual (Tannen, et al., 2015, p. 798). Film dapat menyampaikan realitas sosial melalui narasi yang seringkali lebih mudah dipahami oleh khalayak luas sebagai alat komunikasi visual (Shohat & Stamp, 2014, p. 21). Namun, dinamika diskursus publik yang terbentuk terhadap sebuah film yang membahas masalah sensitif seperti kekerasan seksual menjadi lebih kompleks (Schwark, 2017, p. 2). Sebagai contoh, film *Dear David* (2023) menjadi kontroversi dan menimbulkan perdebatan publik di media sosial karena masyarakat Indonesia atau biasa disebut *netizen* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai penggambaran pelecehan seksual pada film tersebut (CNN, 2023). Sebagian kreator film memuji film tersebut menjadi film terbaik pada tahun 2023, namun masyarakat menyayangkan bahwa film tersebut terlalu meromantisasi adegan pelecehan seksual (CNN, 2023).

Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan tetapi juga berfungsi sebagai penggambaran dari realitas sosial dan sebagai alat yang memiliki kekuatan untuk mengubah cara orang melihat dunia (Shimpach, 2007, p. 142). Kekerasan seksual yang digambarkan dalam film bukan hanya masalah seni atau hiburan tetapi juga masalah moral sosial dan etika seringkali menjadi subjek kontroversi (Bordwell & Thompson, 2019, p. 394). Terbentuknya diskursus publik tentang masalah ini, memiliki banyak perspektif yang berbeda. Mulai dari mereka yang mendukung penayangan kekerasan seksual yang realistis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hingga mereka yang menentang penayangan tersebut karena dianggap mengeksploitasi trauma korban.

Diskursus publik semakin mudah diakses dan tersebar berkat adanya *platform* media sosial seperti X (sebelumnya Twitter), Facebook, Instagram dan TikTok. *Platform-platform* ini

tidak hanya memberi ruang untuk berbicara, tetapi juga memungkinkan menjadi tempat berdiskusi dan berpartisipasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Papacharissi (2015, p. 115) mengatakan bahwa, era digital telah mengubah cara orang berbicara di depan umum. Orang-orang dari berbagai latar belakang dapat dengan mudah berbicara tentang masalah yang relevan seperti kekerasan seksual dalam film. Namun, menurut Sunstein (2018, p. 67) mengatakan bahwa, meskipun *platform* ini menawarkan akses yang lebih luas, algoritma seringkali bertanggung jawab atas terciptanya dinamika diskursus publik dan lebih fokus pada konten yang viral dan kontroversial daripada konten yang mendalam dan kritis. Selain itu, fenomena *buzzer* yang berkembang pada era digital dapat mempengaruhi opini publik (Hamdani, 2024). Teknik *buzzing* sering digunakan oleh kelompok atau individu untuk kepentingan negatif, seperti disinformasi atau menggiring opini publik (Danu, 2024).

Dinamika ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas diskursus publik. Di satu sisi kekerasan seksual dan masalah lainnya menjadi topik pembicaraan hangat dalam waktu singkat karena kemampuan media sosial untuk menyebarluaskan informasi dengan cepat. Sebaliknya, stigma polarisasi pendapat dan penyebaran informasi yang salah dapat mengganggu kualitas diskusi (Sunstein, 2018, p. 72). Stigma polarisasi atau kecenderungan masyarakat untuk membentuk kelompok yang berbeda berdasarkan ideologi mereka juga dapat menciptakan *echo chambers*, di mana orang-orang hanya melihat perspektif yang memperkuat pandangan mereka sendiri dan melemahkan diskursus yang sehat (Arora, et al, 2022, p. 2). Konten emosional dan sensasional sering diprioritaskan oleh algoritma media sosial yang mendorong viralitas yang mengalihkan perhatian publik dari diskursus yang mendalam ke arah kontroversi yang lebih sederhana (Hargens, 2021). Akibatnya diskursus tentang penggambaran kekerasan seksual dalam film seringkali hanya berfokus pada masalah permukaan seperti kelayakan film, daripada melihat dampak sosial dan etika dari

penggambaran tersebut terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan (Hasanudin, 2024).

Publik sering terlibat dalam diskursus yang intens terkait dengan film-film yang menggambarkan kekerasan seksual (Caputi, 2019). Beberapa film telah memicu diskursus yang luas tentang bagaimana kekerasan seksual seharusnya digambarkan dalam film. Sebagai contoh film yang berjudul *Hope* (2013) menunjukkan dampak yang signifikan terhadap anak-anak dan keluarga korban serta mengkritik cara masyarakat merespon peristiwa tersebut. Selain itu film-film seperti *The Hunting Ground* (2015) dan *Audrie and Daisy* (2016) membahas masalah pelecehan seksual di kampus-kampus di Amerika Serikat dan menyoroti ketidakadilan sistemik seperti diskriminasi dan ketimpangan sosial dalam penanganan kasus pelecehan (Chandra, 2024).

Di Indonesia film *Like & Share* (2022) membahas masalah kekerasan seksual di era teknologi yang memengaruhi kehidupan korban. Hal ini menunjukkan bagaimana internet dapat memperburuk trauma melalui pelecehan di media sosial dan memungkinkan orang untuk berdiskusi tentang pentingnya melindungi korban dan membuat regulasi di internet (Wire, 2022). Diskursus mengenai penggambaran kekerasan seksual di film kerap kali menyentuh masalah etika, bagaimana korban digambarkan dan film-film ini berperan dalam meningkatkan kesadaran atau justru mengeksploitasi trauma (Salsabila, 2022).

Pada tahun 2024, muncul sebuah film horor berjudul *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) film tersebut menampilkan kekerasan seksual secara eksplisit memicu perdebatan di kalangan penonton mengenai batas-batas etika dalam penggambaran kekerasan seksual dalam film (Pertiwi, 2024). Film ini menjadi film terlaris kedua pada tahun 2024 dan mengumpulkan 5,8 juta penonton setelah 41 hari tayang pada tanggal 18 Juni 2024 (Kusuma, 2024). Film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) berbeda dari film horor Indonesia lainnya karena film ini mengemas cerita dengan menampilkan kekerasan seksual. Film horor Indonesia biasanya bercerita tentang

kisah-kisah supranatural dan mitologi lokal (Yucki, 2022). Seperti contoh, film yang berjudul *Satu Suro (2019)* bercerita tentang mitos malam satu suro yang dianggap sebagai waktu keluarnya makhluk halus dan masyarakat dilarang untuk berpergian atau melakukan aktivitas pada malam tersebut (Khafid, 2019). Kemudian, ada film yang berjudul *Tembang Lingsir (2019)* megisahkan mitos lagu lingsir wengi yang dianggap sebagai lagu untuk memanggil makhluk halus (Nural, 2021).

Gambaran kekerasan seksual yang kontroversial pada film *Vina: Sebelum 7 Hari (2024)* memicu reaksi yang beragam dari publik. Sebagian penonton melihat film ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan dampaknya terhadap korbannya sementara yang lain mengkritiknya sebagai eksploitasi bahkan sebagai tindakan yang tidak peka terhadap perasaan korban kekerasan seksual (BBC, 2024). Dinamika ini menunjukkan kompleksitas film sebagai jenis seni yang memiliki kebebasan ekspresi namun di sisi lain, ada batasan etis dan moral yang harus diperhatikan. Terutama ketika gambar-gambar tersebut dapat memengaruhi orang-orang yang rentan seperti korban kekerasan seksual. Gambaran yang tidak sensitif tentang kekerasan seksual dapat memperburuk trauma korban dan mendorong stereotip yang salah tentang kekerasan seksual (Rodenhizer & Edwards, 2017, p. 443). Namun penggambaran yang hati-hati dan bertanggung jawab dapat meningkatkan pemahaman publik tentang masalah dan mendorong diskusi yang produktif tentang cara masyarakat harus menanggapi masalah tersebut (Schwark, 2017, p. 3).

Film *Vina: Sebelum 7 Hari (2024)* memicu diskursus publik yang intens terutama di media sosial seperti Instagram dan Tiktok (Lavenia, 2024). Ada banyak komentar dan ulasan tentang film tersebut menampilkan penggambaran kekerasan seksual. Film ini dengan cepat menjadi viral di media sosial dan menarik perhatian masyarakat luas (Pertiwi, 2024). Penggambaran kekerasan seksual dalam film ini berhadapan dengan norma budaya dan sosial Indonesia yang sering kali tabu, sehingga menghasilkan ketegangan antara dorongan untuk

membuka dialog dan menjaga nilai-nilai moral tradisional. Selain itu, film ini memberikan contoh penggambaran visual yang dapat dipelajari untuk memahami bagaimana narasi film memengaruhi persepsi publik. Meskipun menimbulkan banyak perdebatan terkait dengan penggambaran kekerasan seksual, namun menurut Lembaga Sensor Film (LSF) menyatakan bahwa film ini tidak melanggar aturan dan masih layak untuk ditonton oleh umur 17 tahun ke atas (Pertiwi, 2024). Sehingga, film ini menarik untuk diteliti karena banyak perdebatan dan diskursus mengenai penggambaran kekerasan seksual tersebut.

Peneliti mengeksplorasi bagaimana diskursus publik tentang penggambaran kekerasan seksual dalam film berkembang dan bagaimana media sosial memediasi diskursus ini. Dengan menggunakan pendekatan teori diskursus publik yang dikemukakan oleh Habermas (1984) penelitian ini melihat film sebagai produk yang dapat membentuk diskursus publik dan masyarakat menegosiasikan makna dari penggambaran kekerasan seksual dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Ruang publik seharusnya menjadi wadah untuk individu dapat berdiskusi secara rasional tentang isu-isu sosial yang penting, namun di era digital ruang publik ini sering kali terdistorsi oleh dinamika pasar dan teknologi yang mendorong viralitas dan komodifikasi informasi (Fuchs, 2015, p. 337).

Merujuk pada uraian di atas, maka penelitian berjudul *Dinamika Diskursus Publik Terhadap Penggambaran Kekerasan Seksual pada Film Vina: Sebelum 7 Hari (2024)* berfokus menganalisis dinamika diskursus publik yang muncul seputar penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari (2024)*. Penelitian ini mengeksplorasi film tersebut menggambarkan isu kekerasan seksual dan melihat respon masyarakat. Selain itu, penelitian ini meneliti perbedaan perspektif yang muncul, baik dari penonton yang mendukung bahwa film ini penting untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan mereka yang mengkritik cara penggambaran tersebut dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana dinamika diskursus publik terhadap penggambaran kekerasan seksual pada film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024)?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika diskursus publik yang muncul sebagai respons terhadap penggambaran kekerasan seksual dalam film *Vina: Sebelum 7 Hari* (2024) dengan memperhatikan pandangan audiens.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi terhadap kajian media, khususnya dalam memahami bagaimana penggambaran kekerasan seksual dalam film memengaruhi persepsi masyarakat dan membentuk diskursus publik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hubungan antara media, budaya dan konstruksi sosial terkait kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait topik film dan kekerasan seksual.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat film, penulis naskah, dan produser untuk lebih peka terhadap implikasi sosial dari konten yang mereka sajikan terutama isu kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media untuk evaluasi kebijakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) terkait penggambaran kekerasan seksual dalam film.